



**FAKTOR – FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh :

**ELLA KUSFATMAWATI
NIM : 110810101169**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**FAKTOR – FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh :

**ELLA KUSFATMAWATI
NIM : 110810101169**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**FAKTOR – FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

**ELLA KUSFATMAWATI
NIM : 110810101169**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sungguh tiada kata yang lebih indah selain bersyukur alhamdulillah ku haturkan kehadiran Allah SWT yang selalu membimbing dan menerangi jalanku serta memudahkan setiap urusan-urusanku.

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1 Kedua Orang Tuaku Bapak Abu Shaeri dan Ibu Tutik Kurniatin tersayang yang dengan tulus memberikan kasih sayang, membekaliku dengan doa yang tiada pernah putus diberikan kepadaku untuk menjadi lebih dewasa dan mengenal arti kehidupan serta mendidikku untuk selalu sabar dan bersyukur dalam menghadapi kenyataan hidup yang terkadang tidak sesuai harapan sebagai bekal menuju kesuksesan.
- 2 Bapak dan Ibu dosen yang dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan kepadaku.
- 3 Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi UNIVERSITAS JEMBER.

MOTTO

“Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu”

(Umar Bin Khattab)

“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin jika kita telah berhasil melakukannya dengan baik”

(Andrew Jackson)

“Bersemangatlal atas hal-hal yang bermanfaat bagimu.

Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah “

(HR Muslim)

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”

(Winston Churchill)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ella Kusfatmawati

NIM : 110810101169

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah saya yang berjudul “Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan hasil karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 31 Maret 2015

Yang menyatakan,

Ella Kusfatmawati

NIM. 110810101169

SKRIPSI

**FAKTOR – FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI
KABUPATEN BANYUWANGI**

Disusun Oleh:

Ella Kusfatmawati

NIM 110810101169

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Agus Luthfi, M.Si.

Dosen Pembimbing II : Dra. Anifatul Hanim, M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi
Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Desa Karangdoro
Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi

Nama Mahasiswa : Ella Kusfatmawati
NIM : 110810101169
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Disetujui Tanggal : 31 Maret 2015

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. H. Agus Luthfi, M.Si
NIP. 19650522 199002 1 001

Dra. Anifatul Hanim, M.Si
NIP. 19650730 199103 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**FAKTOR-FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ella Kusfatmawati

NIM : 110810101169

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

08 Mei 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Teguh Hadi Priyono S.E., M.Si (.....)
NIP. 197002061994031002
2. Sekretaris : Dr. Lilis Yulianti S.E., M.Si. (.....)
NIP. 196907181995122001
3. Anggota : Drs. P.Edi Suswandi, MP (.....)
NIP. 195504251985031001
4. Pembimbing I : Drs. H. Agus Luthfi, M.Si (.....)
NIP. 196505221990021001
5. Pembimbing II : Dra. Anifatul Hanim, M.Si (.....)
NIP. 196507301991032001



Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad. Fathorrazi, SE., M. Si
NIP. 19630614 1 199002 1 001

FAKTOR – FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

ELLA KUSFATMAWATI

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pajak merupakan suatu sumber pendapatan pemerintah paling besar didalam anggaran dan belanja negara, sehingga pajak menjadi sangat penting untuk pembangunan suatu negara. Salah satu sumber pendapatan dari sektor pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena PBB merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Untuk itu peran kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sangatlah penting untuk membiayai pembanguna. Tujuan penelian ini adalah untuk mengetahui variabel pendidikan (X1), Pendapatan (X2), dan Persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah jumlah 97 responden. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dalam menganalisis variabel-variabelnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, pendapatan dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci : Pendidikan, Pendapatan, Persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak, Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

THE INFLUENCE OF SOSIO ECONOMIC FACTORS TOWARD SOCIETIES'
OBEDIENCE IN DOING TAX ON LAND AND BUILDING PAYMENT IN
KARANGDORO VILLAGE TEGALSARI SUBDISTRICT BANYUWANGI
REGENCY

ELLA KUSFATMAWATI

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics
University of Jember*

ABSTRACT

Taxes are a major source of government revenue in the budget and expenditure, so that taxes be very important for the development of a country. One source of revenue from taxes that land and building tax (PBB), because the UN is a potential source of revenue for the region. For the role of the public in compliance with the tax payment is essential to finance with establishment. The purpose of this study presented was to determine the education variable (X1), Revenue (X2), and the perception taxpayers on tax penalties (X3) has a significant influence on society Compliance in paying tax on land and buildings in the village of Karangdoro Banyuwangi. The sample in this study were taken using purposive sampling technique with a number of number of 97 respondents. This study used logistic regression analysis to analyze variables. The results showed that education, income and taxpayer perceptions about tax penalties significant and positive impact on the community compliance in paying tax on land and buildings in the village of Karangdoro Banyuwangi.

*Keywords: Education, Income, Perception tax payers about tax penalties,
Compliance society inpay Property Tax*

RINGKASAN

Faktor – Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi; Ella Kusfatmawati, 110810101169; 2015; 70 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Penelitian ini berjudul “Faktor – Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”. Tujuan penelian ini adalah untuk mengetahui variabel pendidikan (X_1), Pendapatan (X_2), dan Persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis *explanatory research* yaitu suatu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik dalam menganalisis variabel-variabelnya. Untuk variabel terikatnya berupa *dummy variabel*, dimana Y mempunyai kriteria nilai kemngkinan 0 dan 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai koefisien pada variabel pendidikan (X_1) 1,510, menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendidikan akan memberikan peluang prediksi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB sebesar 1,510 kali, dan sebaliknya. Dengan artian bahwa pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Probabilitas masyarakat membayar PBB karena adanya pendidikan adalah sebesar 145,663%, jika semakin banyak responden didalam suatu wilayah, kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB akan meningkat. Nilai koefisien pada variabel pendapatan (X_2) 1,361,

menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan akan memberikan peluang prediksi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB sebesar 1,361 kali dan sebaliknya. Dengan artian bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB. Probabilitas masyarakat membayar PBB karena adanya pendapatan adalah sebesar 131,18%, jika semakin banyak responden didalam suatu wilayah, kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB akan meningkat. Nilai koefisien pada variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak (X_3) 4,423, menunjukkan bahwa setiap kenaikan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak akan memberikan peluang prediksi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB sebesar 4,423 kali dan sebaliknya. Dengan artian bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB. Probabilitas masyarakat membayar PBB karena adanya persepsi wajib pajak tentang sanksi adalah sebesar 428,194%, jika semakin banyak responden didalam suatu wilayah, kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB akan meningkat.

PRAKATA

Segala puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Agus Luthfi, M.Si dan Dra. Anifatul Hanim, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan segenap kesabaran dengan penuh keikhlasan, dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, saran serta motivasi dalam penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, S.E., M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
3. Bapak Dr. H. M. Fathorrazi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah memberikan bimbingan dan banyak ilmu kepada penulis sampai akhirnya studi ini dapat terselesaikan;
5. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Abu Shaeri dan Ibu Tutik Kurniatin atas segala doa dan kasih sayang, motivasi, dukungan yang diberikan selama ini, senantiasa sabar dan ikhlas mengorbankan segalanya untuk keberhasilanku;
6. Kakak-kakakku dan Adikku yang telah memberiku semangat dan dukungan;

7. Ahmad Zainul Mubarak, yang telah sabar menunggu dan menemaniku, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan motivasi;
8. Teman - teman Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember angkatan 2011;
9. Teman - teman kost gang pajak, yang telah menemaniku sehari-hari selama menjalani studi;
10. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi pembaca.

Jember, 31 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Adolf Wegner	9
2.1.2 Teori Peacock dan Wiseman	9
2.1.3 Teori batas kritis Colin Clark.....	11
2.1.4 Konsep Kepatuhan Perpajakan	11

2.1.5 Penerimaan Daerah	12
A. Pengertian Pajak	13
B. Fungsi Pajak.....	14
2.1.7 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15
1. Subjek PBB	15
2. Objek PBB	16
3. Objek Pajak yang Tidak dikenakan PBB.....	16
4. Dasar Pengenaan PBB	17
5. Tarif PBB.....	17
2.1.8 Pengaruh Faktor Pendidikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB.....	18
2.1.9 Pengaruh Faktor Pendapatan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB.....	18
2.1.10 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Konseptual	25
2.4 Hipotesis	26
BAB 3. METODE PENELITIAN	27
3.1 Rancangan Penelitian.....	27
3.1.1 Jenis Penelitian.....	27
3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.1.3 Tehnik Pengumpulan Data.....	27
3.1.4 Populasi dan Sampel	29
3.1.5 Instrumen Penelitian	30
3.1.6 Identifikasi dan definisi operasional variabel	31
3.2 Metode Analisa Data	33
3.2.1 Analisis Deskriptif Statistik	33
3.2.2 Uji Normalitas	33

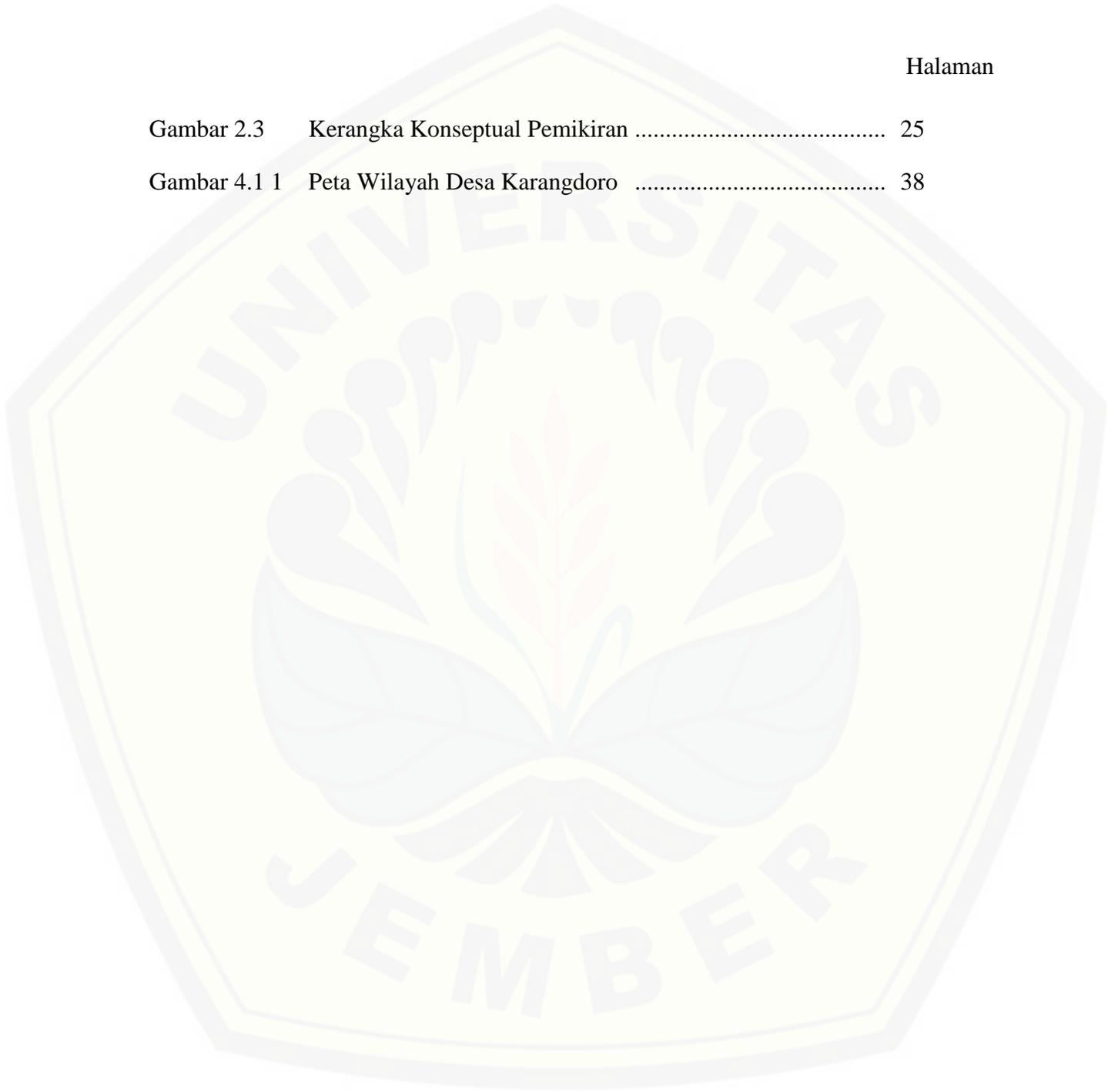
3.2.3	Asumsi Fit Model	33
3.2.4	Analisis Regresi Logistik	34
3.2.5	Uji Hipotesis	35
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		37
4.1	Gambaran Umum Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi	37
4.1.1	Keadaan Wilayah dan Geografi	37
4.1.2	Profil Masyarakat Desa Karangdoro	38
4.1.3	Keadaan Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan	39
4.1.4	Karakteristik Responden	40
4.2	Hasil Analisis	42
4.2.1	Hasil Analisis Deskriptif Statistik.....	42
4.2.2	Hasil Analisis Uji Normalitas <i>Kolmogorov-smirnov Test</i> ...	43
4.2.3	Hasil Asumsi Fit Model	44
4.2.4	Hasil Analisis Regresi Logistik.....	46
4.2.5	Hasil Uji Hipotesis	47
1	Uji <i>Wald Test Homster</i> dan <i>Lameshow</i>	47
2	Uji <i>Omnibus Test</i>	49
3	Variabilitas <i>Nagelkerke R Square</i>	49
4.3	Pembahasan Hasil Analisis	50
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN		54
5.1	Kesimpulan	54
5.2	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN		59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Daftar Realisasi PBB Desa Karangdoro Tahun 2010-2014 5
Tabel 2.2	Penelitian-penelitian sebelumnya 22
Tabel 4.1	Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan golongan Umur 38
Tabel 4.2	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 39
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 40
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Status 41
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 42
Tabel 4.6	Hasil Analisis Deskriptif Statistik 43
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas 44
Tabel 4.8	<i>Hosmer and Lemeshow Test</i> 45
Tabel 4.9	<i>Likelihood fit model</i> 45
Tabel 4.10	Hasil Regresi Logistik 46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Pemikiran	25
Gambar 4.1 1 Peta Wilayah Desa Karangdoro	38



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1.KUESIONER PENELITIAN.....	59
LAMPIRAN 2.REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN.....	62
LAMPIRAN 3.HASIL ANALISIS REGRESI LOGISTIK.....	64
LAMPIRAN 4. TABEL X^2	70

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yakni kesejahteraan yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah, khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah. Untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1997).

Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditujukan untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari program pemerintah yang dibuat dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan daerah dalam mengelola informasi kedaerahan, membuat pemerintah daerah berada dalam posisi lebih baik, untuk memobilisasi sumber daya secara mandiri serta untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sejak diberlakukannya undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, telah terjadi perubahan-perubahan besar, baik dalam aspek kewenangan, aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, struktur, maupun kultur pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar

mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Dalam melaksanakan otonomi daerah, seperti diatur dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan atas asas desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil. Adanya perimbangan keuangan ini disebabkan karena adanya keterbatasan sumber pendapatan daerah yang berupa pajak daerah, pendapatan non pajak dan retribusi untuk masing-masing daerah (sukirno, 2004).

Menurut Insukindro, dkk (1994) Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh Pemerintah. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan belanja rutin pemerintah, tetapi diharapkan juga untuk membiayai pembangunan.

Salah satu sumber dana dari sektor pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak

pusat yang objeknya berada di daerah. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Menurut Mardiasmo (2009), Dana Bagi Hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah
- 2 10% (Sepuluh persen) untuk Pusat

Jumlah 90% (Sembilan puluh persen) bagian daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
2. 64,8% (Enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
3. 9% (Sembilan persen) untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Jumlah 10% (Sepuluh persen) dalam Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan rincian sebagai berikut:

1. 65% (Enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota.
2. 35% (Tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten/Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Menurut Suharno (2003), untuk mempermudah pelaksanaannya, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Perpajakan Indonesia menganut *Self assesment*

system, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Jumlah objek pajak yang besar, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang adanya pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak tentang arti penting pengenaan pajak yang masih rendah sangat mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak di pedesaan. Masih banyak wajib pajak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya dengan baik dan jujur. Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Demi memaksimalkan pemasukan dari pajak maka pemerintah pun menerjunkan tim yang bertugas mensosialisasikan tentang masalah perpajakan ke seluruh pelosok daerah, baik yang sudah maju maupun yang masih berada di pedalaman. Dalam kinerja ini pemerintah pusat mendistribusikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melakukan penarikan pajak kepada masyarakat, tetapi pada kenyataannya pemerintah daerah masih mengalami kesulitan dalam penarikan pajak. Kendala atau kesulitan tersebut terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia, termasuk di kabupaten Banyuwangi, yang penanganan berbagai macam pajak dilakukan oleh dinas perpajakan. Akibat dari kesulitan atau kendala tersebut menyebabkan penarikan pajak secara umum kurang maksimal. Dari evaluasi kerja dan pendapatan pajak yang selama ini berlangsung, maka pemerintah membagi tugas secara terperinci dan sebagai langkah awal adalah dengan melimpahkan masalah perpajakan bumi dan bangunan yang semula ditangani dinas perpajakan kepada dinas pendapatan daerah (DISPENDA).

Berdasarkan informasi dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Banyuwangi, telah dilakukan berbagai macam pendekatan terhadap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. dan jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan yang nantinya diharapkan pemerintah kecamatan lebih menekankan kepada pemerintah desa agar masyarakatnya mau membayar pajak. Peranan pemerintah desa pun semakin kuat dalam ikut mensukseskan program penarikan perpajakan ini, semua desa di kabupaten Banyuwangi membuat tim sendiri dalam proses penarikan pajak. Termasuk desa Karangdoro kecamatan Tegalsari juga melakukan hal yang sama, pemerintahan desa Karangdoro membagi tugas melalui beberapa perangkat desa untuk mensukseskan penarikan pajak tersebut.

Data yang kami peroleh dari Dinas pendapatan Kabupaten Banyuwangi menyatakan persentase wajib pajak yang membayar pajak dan besarnya pajak yang diperoleh selama 5 tahun yakni tahun 2010 – 2014. Tabel 1.1 menjelaskan realisasi PBB Desa Karangdoro tahun 2010 – 2014.

Tabel 1.1 Daftar Realisasi PBB Desa Karangdoro
Tahun 2010-2014

Tahun	Wajib Pajak yang membayar PBB	Jumlah Pajak (Rp)
2010	97,00%	88,571,137
2011	84,85%	89,836,641
2012	97,20%	89,608,980
2013	96,33%	81,792,743
2014	88,96%	104,893,868

Sumber : Dispenda Kab.Banyuwangi

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa setiap tahun persentase jumlah wajib pajak yang membayar PBB cukup signifikan. Selama 5 tahun terakhir diperoleh data bahwa jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar PBB belum mencapai 100%. Kepatuhan dalam membayar pajak berperan penting dalam memaksimalkan penerimaan negara. Namun dalam praktiknya tidak semua orang taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga ini menjadi salah satu penghambat penerimaan negara. Oleh karena itu setiap tahunnya pihak kantor pajak maupun pemerintah daerah terus melakukan usaha guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan juga meningkat.

Perangkat desa berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan panarikan pajak tersebut, tapi ternyata hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, masih terdapat beberapa wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Penduduk Desa Karangdoro mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, sehingga berdampak terhadap pendapatan wajib pajak. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh akan menyebabkan kemauan wajib pajak untuk membayar PBB. Tingkat pendapatan wajib pajak cukup tinggi diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara baik dan juga menjadi patuh karena kebutuhan-kebutuhan dasar secara ekonomis dapat terpenuhi. Wajib pajak dengan penghasilan rendah terkadang merasa enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena merasa kebutuhan dasarnya belum terpenuhi dengan baik.

Tingkat pendidikan seseorang juga menentukan kesadaran wajib pajak tentang arti penting dalam membayar pajak. Sehingga tingkat pendidikan seseorang akan berdampak terhadap pemahaman seseorang terhadap pembayaran PBB dan ketentuan-ketentuan terkait dalam pajak. Misalnya tentang sanksi denda dalam pajak. Masih banyak wajib pajak yang pemahamannya kurang dan tidak tahu tentang berlakunya sanksi denda dalam pajak. Dari ketidak tahuan mereka tentang sanksi menyebabkan mereka lebih mementingkan keperluan pribadi daripada membayar PBB. Bahkan ada pula yang setuju dan tidak setuju dengan berlakunya sanksi denda bagi wajib pajak yang telat membayar PBB.

Menurut hasil dan wawancara dengan perangkat desa, bahwa terdapat kesulitan dalam penarikan PBB kepada wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar PBB. Keterlambatan waktu pembayaran akan dikenakan sanksi denda 2%. Akan tetapi dari sebagian wajib pajak yang dikenakan sanksi denda tidak mau membayar karena ketidak tahuan mereka tentang sanksi denda. Hal ini menyebabkan pemerintahan desa harus menutupi denda yang dikenakan wajib pajak dan kekurangan penarikan PBB dengan kas desa, sehingga anggaran kas desa yang semula digunakan untuk membiayai kepentingan lainnya harus digunakan untuk menutupi kekurangan penarikan pajak tersebut sehingga menimbulkan masalah dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pemerintahan desa Karangdoro. Mengingat sangat pentingnya kepatuhan dalam membayar PBB dalam memaksimalkan penerimaan negara, maka peneliti perlu mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan bangunan di Desa Karangdoro Kecamatan tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang ada di atas, maka dalam penelitian ini dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro?
2. Apakah faktor pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro?
3. Apakah faktor persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro?

3.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro;
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro.

3.4. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai suatu eksperimen yang dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi civitas akademika.
3. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten serta lembaga yang terkait dalam melakukan pendekatan pada masyarakat, dan
4. Dapat memberi tambahan informasi atau masukan untuk menciptakan berbagai macam konsep keilmuan dan penelitian.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Adolf Wegner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 1995). Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PPkP}{PPK1} < \frac{PkPPn}{PPK2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn}$$

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1, 2, ... n : Jangka waktu (tahun)

2.1.2 Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan

pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar. (Mangkoesobroto, 1995)

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Menurut Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Basri, 2005).

Dalam keadaan normal, kenaikan PDB menyebabkan baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi terganggu yang disebabkan karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk berinvestasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah (Basri, 2005).

Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke

tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*) (Mangkoesobroto, 1995)

2.1.3 Teori batas kritis Colin Clark

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25% dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregate. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat. Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregate dan penawaran agregate. Apabila batas 25% terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

2.1.4 Konsep Kepatuhan Perpajakan

Devano dan Rahayu (2006) menyatakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak

yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan menyatakan wajib pajak yang patuh dilihat dari : kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana.

Menurut Rajiman (2014) Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa criteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1 Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- 2 Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3 Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4 Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %.
- 5 Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.5 Sumber- Sumber Penerimaan Daerah

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tercermin kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang sangat ditentukan oleh

potensi yang dimiliki. Adapun sumber-sumber pendapatan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 UU Nomor 32 tahun 2004 terdiri dari :

- 1 Pendapatan Asli Daerah
- 2 Dana Perimbangan
- 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diusahakan langsung oleh pemerintah daerah (UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 6) bersumber dari :

- 1 Pajak Daerah
- 2 Retribusi Daerah
- 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
- 4 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

A. Pengertian Pajak

Mardiasmo (2008) mengemukakan bahwa Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak juga dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dari aspek ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga dapat dikatakan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dari aspek hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari aspek keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari aspek sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat/dampak terhadap masyarakat atas pemungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri (Waluyo dan Wiraman, 2007).

Menurut Mangkoesoebroto (1998) Pengaruh pajak terhadap pembangunan ekonomi yaitu pajak merupakan modal dasar pembangunan. Lebih dari dua pertiga modal dasar pembangunan adalah berasal dari pajak. Mekanisme bekerjanya sistem pajak seperti ini dapat dijelaskan seperti berikut. Pada saat pemerintah melakukan belanja barang dan jasa terjadi aliran pendapatan dari pemerintah ke dalam masyarakat. Termasuk juga dalam hal ini beberapa multiplier effect dalam bentuk, misalnya employment creation dan peningkatan output. Kenaikan pendapatan masyarakat ini akan merangsang peningkatan permintaan dan dalam kondisi penawaran yang relatif terbatas akan terjadi kecenderungan kenaikan harga (untuk selanjutnya mengarah pada inflasi). Dalam situasi seperti ini sebagian dari pendapatan masyarakat yang meningkat itu diambil oleh pemerintah melalui pajak untuk membiayai defisit anggaran berikutnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai forced saving, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembentukan modal.

B. Fungsi Pajak

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.7 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut Wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Mardiasmo, 2003).

1 Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata :

- 1) Mempunyai hak atas bumi/tanah.
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi/tanah.

- 3) Memiliki, menguasai atas bangunan
- 4) Memperoleh manfaat atas bangunan.

2 Objek pajak bumi dan bangunan adalah :

- 1) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
- 2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Menurut (Mardiasmo, 2003) yang termasuk pengertian bangunan adalah :

- a) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b) Jalan TOL.
- c) Kolam renang.
- d) Pagar mewah.
- e) Tempat olah raga.
- f) Galangan kapal, dermaga.
- g) Taman mewah.

3. Objek Pajak yang Tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2003) :

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh kepentingan.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak.
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri keuangan.

4. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

- 1) Adanya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau nilai objek pajak pengganti.
- 2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun dengan perkembangan daerahnya.
- 3) Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Kena Pajak.
- 4) Besarnya persentase Nilai jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

5. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% dan jenis tarif ini disebut sebagai Tarif tunggal yang berlaku terhadap obyek pajak jenis apapun di seluruh wilayah Indonesia. Tarif efektif Pajak Bumi dan Bangunan adalah 0,1% untuk objek yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari 1 milyar dan 0,2% untuk objek yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sama dan di atas 1 milyar (Valentina & Aji Suryo, 2006)

2.1.8 Pengaruh Faktor Pendidikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB

Pendidikan adalah usaha sadar yang bertujuan mengembangkan kepribadian dan kemampuan (Kansil,1993). Menurut Guritno dalam Astuti dan Rini (2008) pendidikan membimbing seseorang agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Dalam hal ini pendidikan wajib pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam melakukan kewajiban pajaknya tentang tata cara serta hukum pajak yang berlaku di Indonesia. Banyak wajib pajak tidak melaporkan kewajiban pajaknya karena tidak tau bagaimana cara mengisi dan melaporkan SPT hal ini karena pengetahuan dari wajib pajak yang kurang, serta kurangnya sosialisasi serta pendidikan perpajakan sangat kurang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang perpajakan tentu tidak mengerti apa itu pajak, fungsi pajak, dan tujuan pajak itu sendiri. Sehingga akan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

2.1.9 Pengaruh Faktor Pendapatan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB

Salah satu faktor kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah besarnya penghasilan yang didapatkannya. Kondisi ekonomi juga dikenal sebagai status ekonomi dengan artian bahwa status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik. Selanjutnya Menurut Geimar dan Lasorte (1964) dalam Friedman (2004) membagi keluarga terdiri dari empat tingkat ekonomi:

1 Adekuat

Adekuat menyatakan uang yang dibelanjakan atas dasar suatu permohonan bahwa pembiayaan adalah tanggung jawab kedua orang tua. Keluarga menganggarkan dan mengatur biaya secara realistis.

2 Marginal

Pada tingkat marginal sering terjadi ketidaksepakatan dan perselisihan siapa yang seharusnya mengontrol pendapatan dan pengeluaran.

3 Miskin

Keluarga tidak bisa hidup dengan caranya sendiri, pengaturan keuangan yang buruk akan menyebabkan didahulukannya kemewahan. Di atas kebutuhan pokok, manajemen keuangan yang sangat buruk dapat atau tidak membahayakan kesejahteraan anak, tetapi pengeluaran dan kebutuhan melebihi penghasilan.

4 Sangat miskin

Manajemen keuangan yang sangat jelek, termasuk pengeluaran saja dan berhutang terlalu banyak, serta kurang tersedianya kebutuhan dasar.

2.1.10 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB

Dalam Astuti dan Rini (2008) persepsi adalah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca indera seseorang terhadap suatu figure, kondisi, atau masalah tertentu. Masyarakat akan memiliki sikap sadar terhadap fungsi pajak dan akhirnya mematuhi pembayaran PBB, jika persepsi mereka terhadap sanksi, khususnya sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dan mampu menjangkau para pelanggar (Suhardito dan Sudiby, 1996).

Menurut Mardiasmo (2009) sanksi bagi wajib pajak adalah apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Apabila berdasarkan hasil

pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak ditambah dengan administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006).

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda diduga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sri Astuti dan Rini (2008) dengan judul “*Analisis faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak PBB dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Perpajakan*” dengan metode alat analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan wajib pajak dan lama tinggal wajib pajak dilokasi objek pajak PBB tidak mempengaruhi kesadaran perpajakan. Penghasilan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan.

Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) dengan judul penelitian “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*” dengan metode alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak

terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Secara keseluruhan model tersebut fit.

Ilham Koentarto (2011) melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (studi kasus pada kecamatan arut selatan Kabupaten kotawaringin barat)*" dengan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian yaitu Variabel SPPT, pe-layanan pajak, pendapatan Wajib Pajak dan sanksi mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan hasil regresi pada nilai *Adjusted R Squared* secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB sebesar 60,9% sedangkan sisanya sebesar 39,1% merupakan kontribusi dari faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini atau dengan kata lain bahwa kepatuhan masyarakat disebabkan oleh faktor SPPT, pelayanan pajak, pendapatan Wajib Pajak dan sanksi sebesar 60,9%.

Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*" dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

Rajiman (2014) melakukan penelitian dengan judul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Surabaya*" dengan menggunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif hal ini sangat penting untuk dapat menggali permasalahan kepatuhan perpajakan secara mendalam dan holistik. hasil dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak di Surabaya adalah tingkat pengetahuan masyarakat, Faktor perilaku pengguna anggaran, faktor pendapatan dan faktor sanksi perpajakan.

Tabel 2.2 Penelitian-penelitian sebelumnya

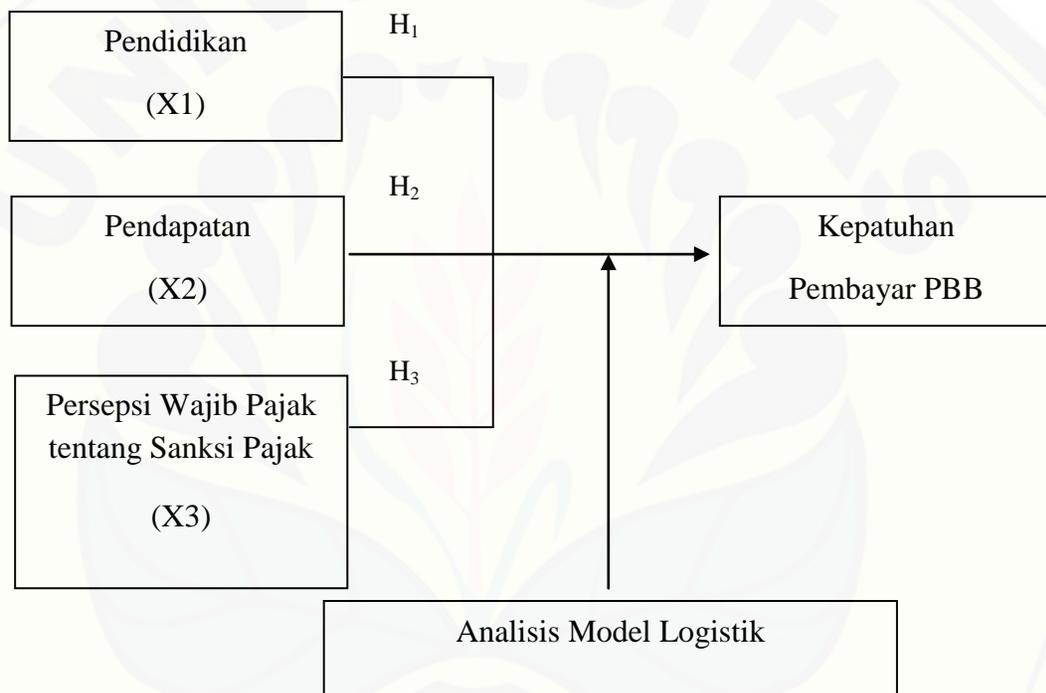
No.	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Sri astuti dan Rini (2008)	Analisis faktor yang melekat pada wajib pajak PBB dan pengaruhnya terhadap kesadaran perpajakan	Pendidikan wp (X1), Lama tinggal wp di lokasi objek pajak PBB (X2), Penghasilan wp (X3), Persepsi wp tentang sanksi denda PBB (X4).	Pendidikan wp dan lama tinggal wp di lokasi objek pajak PBB tidak mempengaruhi kesadaran perpajakan. Penghasilan wp dan persepsi wp tentang sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan
2.	Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak	Kesadaran membayar pajak (X1), Pengetahuan peraturan perpajakan (X2), Pemahaman peraturan perpajakan (X3), Persepsi efektifitas sistem perpajakan (X4), Kualitas Layanan (X5)	sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Secara keseluruhan model tersebut fit.

3.	Ilham Koentarto (2011)	“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak Bumi Dan bangunan (studi kasus pada kecamatan arut selatan Kabupaten kotawaringin barat)”	SPPT (X1), Sanksi (X2), Pelayanan Pajak (X3), Pendapatan Wajib Pajak (X4)	Variabel SPPT, pelayanan pajak, pendapatan Wajib Pajak dan sanksi mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan hasil regresi pada nilai <i>Adjusted R Squared</i> secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB sebesar 60,9% sedangkan sisanya sebesar 39,1% merupakan kontribusi dari faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini atau dengan kata lain bahwa kepatuhan masyarakat disebabkan oleh faktor SPPT, pelayanan pajak, pendapatan Wajib Pajak dan sanksi sebesar 60,9%.
4.	Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)	“Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, Lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya”	kesadaran Wajib Pajak(X1), kualitas pelayanan fiskus(X2), sanksi perpajakan(X3), lingkungan Wajib Pajak berada(X4).	Dapat disimpulkan bahwa lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut. lingkungan Wajib Pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang

				Pribadi di KPP Sawahan Surabaya, karena apabila masyarakat di tempat lingkungan Wajib Pajak berada patuh Wajib Pajak pun ikut patuh..
5.	Rajiman (2014)	“Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya”	Tingkat pengetahuan masyarakat (X1), Faktor perilaku pengguna anggaran (X2), faktor pendapatan (X3) dan faktor sanksi perpajakan (X4).	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana menggali permasalahan kepatuhan perpajakan secara mendalam dan holistik. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya adalah tingkat pengetahuan masyarakat, Faktor perilaku pengguna anggaran, faktor pendapatan dan faktor sanksi perpajakan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang mendasari penelitian tentang faktor-faktor sosial ekonomi dalam memprediksi kepatuhan masyarakat di masa yang akan datang dalam melakukan pembayaran PBB di Desa karangdoro kecamatan Tegalsari Kabupaten banyuwangi adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kajian teori maka dalam penelitian ini dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Diduga Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayar PBB di Desa Karangdoro.
- H₂ : Diduga Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayar PBB di Desa Karangdoro.
- H₃ : Diduga Persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis *explanatory research* yaitu suatu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan variabel bebas dan variabel terikat.

3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di desa Karangdoro kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi karena dalam panarikan PBB dalam 5 tahun terakhir hasilnya belum mencapai 100% dari jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Waktu penelitian yang digunakan kurang lebih dua bulan yang dimulai bulan Januari 2015 - Maret 2015.

3.1.3 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa diketahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan (Sugiyono;2009). Ada dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sedangkan sumber data primer dari penelitian ini yaitu hasil penyebaran kuesioner kepada wajib pajak dan wawancara dengan perangkat desa.

2. Data Sekunder

Adalah data yang mendukung suatu penelitian atau data yang diperoleh dari obyek penelitian. Dalam rangka mengadakan penelitian untuk mengamati maka dibutuhkan data sekunder sebagai berikut :

- i. Gambaran Umum Desa Karangdoro
- ii. Jumlah wajib pajak Desa Karangdoro
- iii. Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2010 - 2014

Adapun tehnik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti. Sutrisno Hadi (2004). Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung pada obyek penelitian dan kemudian dibandingkan dengan jawaban yang diperoleh dari *Interview* (wawancara).

b Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

c Interview (Wawancara)

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan sepihak secara lisan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian (Sutrisno Hadi,2004). Dalam hal ini mengadakan tanya jawab (wawancara) secara langsung dengan wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di desa Karangdoro, untuk memperoleh keterangan yang belum jelas dan terjawab dalam daftar pertanyaan yang diajukan.

d Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya menumental dari seseorang. Metode dokumentasi merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang ada di balai desa Karangdoro yang berkaitan dengan yang diharapkan oleh peneliti.

e Metode Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti guna memperoleh landasan teori dan formulasi yang tepat dalam pemecahan masalah.

3.1.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subyek penelitian. Populasi merupakan kumpulan pengukuran atau data pengamatan yang dilakukan terhadap orang, benda atau tempat. Dimana dalam penelitian ini populasi yang akan digunakan adalah para wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Banyuwangi berjumlah 3349.

2. Sampel

Sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi (Riduwan dan Akon, 2009). Berkaitan dengan pengambilan sampel, maka harus memperhatikan mutu penelitian tidak selalu ditentukan oleh besarnya sampel, akan tetapi oleh kokohnya dasar-dasar teorinya, oleh desain penelitian (asumsi-asumsi statistik), serta mutu pelaksanaan dan pengolahannya.

Penarikan sampel menggunakan teknik *nonprobability sampling*, yaitu dengan melakukan pemilihan sampel yang memiliki pertimbangan karakteristik tertentu dalam jumlah yang diinginkan (Sugiyono, 2008). Metode pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dalam bahasa sederhana *purposive sampling* itu dapat dikatakan sebagai secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti orang-orang tertentu) sesuai persyaratan.

Sampling didalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Sekaran, 2009) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel yang dibutuhkan

N= Jumlah Populasi

e = Persentase kelonggaran ketidak teliti karena kesalahan pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil e = 0,1.

Adapun hasil perhitungan dalam penentuan sampel minimal dengan jumlah populasi rata-rata seperti diatas, dengan menetapkan presisi sebesar 10% (0,1) maka untuk penelitian di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{3349}{1+3349 \times 0,1^2} \\ &= 97.10 \text{ dibulatkan menjadi } 97 \text{ orang} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, berarti populasi yang dijadikan sampel adalah sebanyak 97 orang responden.

3.1.5 Instrumen Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah angket. Angket adalah suatu daftar yang berisikan serangkaian dari pertanyaan – pertanyaan mengenai maksud hal yang akan diteliti. Angket yang digunakan dalam penelitian bersifat terbuka, maksudnya jawaban subyek tidak disediakan dengan pilihan ganda, sehingga responden harus menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapat dan keadaan mereka. Angket dalam penelitian ini merupakan data primer atau data dari tangan pertama, yang merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai bahan informasi yang dicari.

3.1.6 Identifikasi dan definisi operasional Variabel

Identifikasi merupakan variabel penelitian yang diuraikan berdasarkan hipotesis, yaitu:

1 Variabel bebas atau X adalah untuk $X_1 =$ pendidikan, $X_2 =$ ekonomi, dan $X_3 =$ persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB. Variabel bebas (X) adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Dalam hal ini variabel bebas bertindak sebagai penyebab atau mempengaruhi variabel terikat yang dalam hal ini adalah kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Adapun indikator pengukuran dari setiap variabel sebagai berikut :

a) X_1 : Pendidikan

Pendidikan wajib pajak berdasarkan tahun sukses. Dimana setiap naik kelas atau lulus nilainya bertambah 1, dengan kriteria pengukuran sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| i. Tidak Sekolah = 0 | viii. SMA kelas I = 10 |
| ii. SD kelas I = 1 | ix. SMA kelas II = 11 |
| iii. SD kelas II = 2 | x. SMA kelas III = 12 |
| iv. SD kelas III = 3 | xi. Diploma III = 13 |
| v. SMP kelas I = 7 | xii. S1 = 14 |
| vi. SMP kelas II = 8 | xiii. S2 = 15 |
| vii. SMP kelas III = 9 | xiv. S3 = 16 |

b) X_2 : Pendapatan

Untuk mengetahui seberapa besar prediksi tingkat pendapatan maka indikator pengukuran yang digunakan dalam variabel ini yaitu pendapatan keluarga yang diperoleh dalam satu bulan dan menyatakan kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB.

c) X_3 : Presepsi wajib pajak tentang Sanksi Pajak

Presepsi diartikan sebagai suatu penilaian atau pandangan wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi pajak. Apabila dalam keterlambatan membayar pajak akan dikenakan sanksi denda administrasi dan sanksi pidana dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menilai pendapat wajib pajak dengan diberlakukannya peraturan berupa sanksi pajak. Wajib pajak yang tahu akan adanya sanksi tentu akan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar PBB, sedangkan wajib pajak yang tidak tahu tentang adanya sanksi akan menurunkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar PBB sehingga wajib pajak tergolong tidak patuh.

Tahu : 2, tidak tahu : 1

2 Variabel terikat atau Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh setiap perubahan yang terjadi pada variabel X. Variabel Y dalam hal ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Indikator yang digunakan dalam konsep ini adalah kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB.

- i. Membayar PBB sudah sesuai dengan kewajiban.
- ii. Membayar PBB berarti menjadi warga negara yang baik dan taat pajak.
- iii. PBB harus dibayar sebelum tanggal batas/jatuh tempo.
- iv. Tidak pernah terlambat dalam membayar PBB.

$Y = 1$ (Patuh) ; Wajib Pajak yang membayar PBB tepat waktu.

$Y = 0$ (Tidak Patuh) ; Wajib pajak yang tidak/ belum membayar PBB maupun wajib pajak yang membayar PBB tetapi tidak tepat waktu.

3.2 Metode Analisa Data

3.2.1 Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif statistik adalah menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. Analisis deskriptif ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian lanjutan untuk memberikan hasil yang lebih baik terhadap analisis regresi. Analisis deskriptif bersifat penjelasan statistik dengan memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi (Prayitno, 2010).

3.2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan bahwa jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas (Prayitno, 2010). Kriteria pengujian dengan melihat besaran *kolmogorov-smirnov test* adalah;

- 1 Jika signifikansi $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal
- 2 Jika signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal
 - i. Penanggulangan masalah (solusi) persyaratan uji normalitas yang tidak terpenuhi adalah dengan menguji data dari prediksi (*predicted value*) dari variabel yang akan diuji (Baroroh, 2013).

3.2.3 Asumsi Fit Model

Sebelum memperoleh model regresi logistik, maka langkah sebelumnya dilakukan apakah model yang dikembangkan memiliki model yang baik. Asumsi yang harus dipenuhi antara lain : uji *hosmer and lemeshow*, dan *likelihood fit model*,.

1. Uji Hosmer and Lemeshow

Uji *Hosmer and Lemeshow*. Model fit diketahui dengan membandingkan nilai *Hosmer and Lemeshow* > *Chisquare* tabel (pada df dan $\alpha = 5\%$) dan membandingkan signifikansi nilai *Hosmer and Lemeshow* (Sig. > 0,05) (Baroroh, 2013).

2. Likelihood Fit Model

Rasio kecocokan (*likelihood fit model*) adalah dengan membandingkan angka $-2 \text{ Log Likelihood}$ pada model awal ($Block = 0$) dengan angka $-2 \text{ Log Likelihood}$ pada model final ($Block = 1$), “apabila terjadi penurunan $-2 \text{ Log Likelihood}$ “, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model tersebut menunjukkan model fit (Sarwono, 2013).

3.2.4 Analisis Regresi Logistik

Analisis Regresi Logistik merupakan suatu metode statistika yang mendeskripsikan hubungan antara peubah respon yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih peubah penjelas berskala kategori atau interval. Yang dimaksud dengan peubah kategorik yaitu peubah yang berupa data nominal dan ordinal. Model regresi logistik adalah model regresi yang peubah terikat atau respondnya mensyaratkan berupa katagorik. Variabel respond yang mempunyai dua kategori model regresinya disebut dengan biner logistik (Alan A, dalam Pramesti 2013). Jika data hasil pengamatan dengan X_1, X_2, \dots, X_p dengan variabel respond Y , dengan Y mempunyai dua kemungkinan nilai 0 dan 1, $Y = 1$ menyatakan respon yang ditentukan dan sebaliknya $Y = 0$ tidak memiliki kriteria maka Y mengikuti distribusi Bernoulli dengan parameter maka model linier regresi logistik.

Bentuk umum dari model regresi logistik ;

$$\hat{Y}_t = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

- Y1 = Kepatuhan wajib pajak
 = 1 : Ya (patuh)
 = 0 : Tidak (tidak patuh)
- X₁, X₂, X₃ = Variabel bebas (Pendidikan, pendapatan dan persepsi terhadap sanksi pajak)
- b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi logistik variabel bebas terhadap Y

3.2.5 Uji Hipotesis

1. *Wald Test*

Uji wald test digunakan untuk pengujian individu yang menunjukkan apakah suatu variabel bebas signifikan terhadap Y. Untuk mengujinya digunakan *Wald Test Homster* dan *Lameshow* (Baroroh, 2013) dengan hipotesis seperti dibawah ini :

H₀ : β_j = 0 (koefisien β_j tidak signifikan secara statistik)

H₁ : β_j ≠ 0 (koefisien β_j signifikan secara statistik), j=1,2,3.....p

Perhitungan statistik uji wald adalah sebagai berikut:

$$w = \frac{\beta_j}{SE(\beta_j)}$$

Dimana ;

β_j = penaksir parameter β_j

SE (β_j) = penduga standart error dari β_j

p = banyaknya variabel prediktor

Pengambilan keputusan didasarkan pada H₀ ditolak dan H₁ diterima, jika nilai statistik jika Sig < α (0,05) yang berarti β_j signifikan terhadap variabel bebas.

2. Omnibus Test

Uji *omnibus test* digunakan untuk pengujian secara serentak yang menunjukkan apakah suatu variabel bebas signifikan terhadap Y. Untuk mengujinya digunakan *Omnibus Test* (Pramesti, 2013) dengan hipotesis seperti dibawah ini :

$H_0 : \beta_j = 0$ (koefisien β_j tidak signifikan secara statistik)

$H_1 : \beta_j \neq 0$ (koefisien β_j signifikan)

$$X^2 = \frac{g}{k-1} \frac{0_k - n'_k \pi_k}{n'_k - \pi_k} \frac{2}{1 - \pi_k}$$

Dengan

$$0_k = \frac{n'_k}{j=1} \sum y_j, \text{ Jumlah variabel respon pada grup ke- } k$$

$$\pi_k = \frac{n'_k}{j=1} \frac{m_j \pi_j}{n'_k}, \text{ Rata - rata taksiran probabilitas}$$

M_j banyaknya observasi yang memiliki nilai π_j $n'_k =$ banyaknya observasi pada grup ke- k

Pengambilan keputusan didasarkan pada H_0 tolak dan H_1 diterima, jika X^2 hitung $> X^2$ tabel.

3. Nagelkerke R Square

Koefisien ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas yang dapat diterangkan oleh model (Pramesti, 2013). Penggunaan koefisien *Nagelkerke R Square* dengan batas R^2 adalah $0 < R^2 < 1$, dalam model logistik ini digunakan ukuran ketepatan fungsional yang berbeda dengan regresi karena variabel terikatnya *dummy* atau *binary*. Ukuran R^2 pada metode logistik diketahui dari nilai *Nagelkerke R Square* yang didasarkan pada tehnik estimasi *likelihood* dengan nilai yang bervariasi dari nol (0) sampai 1 (satu).

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi

4.1.1 Keadaan Wilayah dan Geografi

Desa Karangdoro merupakan salah satu desa yang ada di daerah kecamatan Tegalsari dan merupakan wilayah kabupaten Banyuwangi. Desa karangdoro bisa dikatakan daerah yang cukup luas, karena luas wilayah ini $\pm 2.643,3$ Km². Wilayah ini merupakan dataran dengan luas 699.287 Ha, untuk luas pemukiman 2,960,45 ha, luas persawahan 221,48 ha, berada pada ketinggian 500 m dari permukaan air laut, dengan curah hujan 2500 Mm/tahun, dan suhu udara rata – rata 32° C.

Desa ini terletak di daerah bagian Selatan kota Banyuwangi yang di lihat dari orbitasi jarak ke pusat pemerintahan kabupaten adalah 52 Km.

Desa Karangdoro bila dilihat dari:

- 1 Batas sebelah Utara adalah berbatasan dengan Desa Dasri dan Desa Tegalrejo.
- 2 Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Karang mulyo.
- 3 Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Tegalrejo dan Dusun Karang Mulyo
- 4 Sebelah Barat berbatas dengan Desa Barurejo.

Desa ini juga dihubungkan melalui jalan Propinsi, Kabupaten dan Desa. Orbitasi, waktu Tempuh dan Letak Desa :

- | | |
|--|------------|
| 1 Jarak ke Ibu Kota Kecamatan | : 5 Km |
| 2 Jarak ke Ibu Kota Kabupaten | : 52 Km |
| 3 Jarak ke Ibu Kota Ke Provinsi | : 268 Km |
| 4 Waktu Tempuh Ke Ibu kota Kecamatan | : 15 Menit |
| 5 Waktu Tempuh Ke Ibu kota Kabupaten | : 60 Menit |
| 6 Waktu Tempuh Ke fasilitas terdekat
(Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan) | : 3 Menit |



Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Karangdoro
(Sumber : Kantor Balai Desa Karangdoro)

4.1.2 Profil Masyarakat Desa Karangdoro

Berdasarkan data profil Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 jumlah penduduk Desa Karangdoro sebanyak 11.390 jiwa, yang terdiri dari 2.718 kepala keluarga, dengan perincian 5.616 laki – laki dan 5.774 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 : Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan golongan Umur

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1	0 – 12 Bulan	13	20	33
2	1 – 5 Tahun	80	221	301
3	6 Tahun – 18 Tahun	1.584	2.225	3809

4	19 Tahun – 56 Tahun	2.237	3.567	5804
5	57 Tahun – 75 Tahun	183	297	480
6	Diatas 75 Tahun	107	212	319
	Jumlah	5.616	5.774	11.390

Sumber data : Dokumen kantor desa Karangdoro Tahun 2013

Penduduk desa Karangdoro mayoritas bermata pencahariaanya adalah di bidang pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	890 Jiwa
2	Buruh tani	1.820 Jiwa
3	Pedagang	489 Jiwa
4	Pertukangan	185 Jiwa
5	Pegawai Negeri Sipil	92 Jiwa
6	Pegawai Swasta	1037 Jiwa
7	Lain – lain	2.476 Jiwa
	Jumlah	6.989 Jiwa

Sumber Data : Dokumen Kantor Desa Karangdoro Tahun 2013

4.1.3 Keadaan Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan penelitian dan informasi yang diperoleh bahwasanya desa Karangdoro terdiri dari tiga dusun yaitu:

- 1 Blokagung
- 2 Karangdoro
- 3 Sumber agung

Dari ketiga dusun tersebut yang terkena wajib pajak hanya ada 2 dusun yaitu blokagung dan dusun Blokagung dan karangdoro. Sedangkan untuk dusun sumberagung tidak terkena pajak dengan alasan termasuk tanah Negara yang dikelola oleh perhutani. Berikut data mengenai keadaan PBB di Desa Karangdoro:

- 1 Jumlah subyek pajak Desa karangdoro berjumlah 3349 KK yang tersebar dalam 46 RT dan 8 RW.
- 2 Luas tanah obyek pajak : 4. 060.398 M
- 3 Bangunan yang terkena obyek pajak : 88. 118 M

4.1.4 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah keseluruhan wajib pajak yang ada di Desa Karangdoro, yang berjumlah 97 orang. Karakteristik responden dalam penelitian ini, yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, karakteristik responden berdasarkan status, dan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan.

1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden terbagi dalam 2 kelompok dari 97 responden, yaitu pria dan wanita. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapati karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1. Berikut data responden berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	
	Jumlah	Persentase
Pria	82	87,62%
Wanita	15	12,38%
Jumlah	97	100%

Sumber : Data Primer diolah, Februari 2015

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi wajib pajak di Desa Karangdoro adalah responden yang berjenis kelamin pria, dan minoritas responden yang menjadi wajib pajak di Desa Karangdoro adalah responden yang berjenis kelamin wanita.

2 Karakteristik Responden Berdasarkan Status

Status responden terbagi dalam 3 kelompok dari 97 responden, yaitu menikah, belum menikah dan duda/ janda. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapati karakteristik responden berdasarkan status dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4. Berikut data responden berdasarkan status ;

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Status

Status	Jumlah	
	Jumlah	Persentase
Menikah	84	86,59%
Belum Menikah	11	11,34%
Duda/ Janda	2	2,1%
Jumlah	97	100%

Sumber : Data Primer diolah, Februari, 2015

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas responden yang menjadi wajib pajak di Desa Karangdoro adalah responden telah menikah, sedangkan minoritas responden yang menjadi wajib pajak di Desa Karangdoro adalah responden telah belum menikah dan duda/ janda.

3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden terbagi dalam 5 kelompok dari 50 responden, yaitu, SD, SMP, SMA, Diploma, dan Strata. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapati karakteristik responden berdasarkan pendidikan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3. Berikut data responden berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	Jumlah	Persentase
SD	35	36,08%
SMP	11	11,34%
SMA	39	40,2%
Diploma	3	3,02%
Strata	10	10,3%
Jumlah	97	100%

Sumber : Data Primer diolah, Februari, 2015

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas responden yang menjadi wajib pajak di Desa Karangdoro adalah responden telah berpendidikan SMA, sedangkan minoritas responden yang menjadi wajib pajak di Desa Karangdoro adalah responden telah berpendidikan SD, SMP, Diploma dan Strata.

4.2 Hasil Analisis

4.2.1 Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif statistik adalah menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. Analisis deskriptif ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian lanjutan untuk memberikan hasil yang lebih baik terhadap analisis regresi. Analisis deskriptif bersifat penjelasan statistik dengan memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maximum, mean, dan standar deviasi (Prayitno, 2010). Adapun hasil uji Analisis Deskriptif Statistik :

Tabel 4.6 Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean
Pendidikan (X_1)	97	3	15	9,51
Pendapatan (X_2)	97	500000	2500000	1250000
Persepsi (X_3)	97	1	2	1,57
Kepatuhan (Y)	97	0	1	0,67
<i>Valid N (listwise)</i>	97			

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.6 berkaitan dengan analisis deskriptif statistik dapat dilihat bahwa dengan jumlah data sebanyak 97, variabel kepatuhan masyarakat (Y) mempunyai rata-rata sebesar 0,67 dengan nilai minimal 0 atau tidak patuh dan maksimal 1 atau patuh. Variabel pendidikan (X_1) mempunyai rata-rata 9,51 atau telah menempuh pendidikan SMP, dengan nilai minimal 3 atau telah menempuh pendidikan kelas 3 SD tahun dan maksimal 15 atau telah menempuh pendidikan S2. Variabel pendapatan (X_2) mempunyai rata-rata Rp. 1.250.000, dengan nilai minimal RP 500.000 dan maksimal Rp. 2.500.000. Variabel persepsi mengenai sanksi (X_3) mempunyai rata-rata sebesar 1,57 atau mengerti mengenai sanksi, dengan nilai minimal 1 atau tidak mengerti mengenai sanksi dan maksimal 1 atau mengerti mengenai sanksi.

4.2.2 Uji Normalitas *Kolmogorov-smirnov Test*

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5% (Baroroh, 2013).

Hasil pengujian dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas

<i>Test of Normality</i>		<i>Kolmogorov-Smirnov</i>			
		Sig.	<i>Cutt off</i>	Keterangan	
Pengujian ke 1	Pendidikan (X_1)	0,000	<	0,05	Tidak Normal
	Pendapatan (X_2)	0,074	<	0,05	Normal
	Persepsi (X_3)	0,000	<	0,05	Tidak Normal
Pengujian ke 2	Predicted Value	0,063	>	0,05	Normal

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.7 pada pengujian ke 1, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau signifikansi untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini belum berdistribusi normal. Pada pengujian ke 2, diketahui bahwa nilai predicted value 0,063 lebih besar dari 0,05, maka dapat diasumsikan keseluruhan data memiliki nilai prediksi yang berdistribusi normal.

4.2.3 Asumsi Model Fit

1. Uji *Hosmer and Lemeshow*

Pada model fit dapat diuji dengan menggunakan uji *Hosmer and Lemeshow*. Model fit diketahui dengan membandingkan nilai *Hosmer and Lemeshow* < *Chisquare* tabel (pada $df = 8$ (15,507) dan $\alpha = 5\%$) dan membandingkan signifikansi nilai *Hosmer and Lemeshow* (Sig. > 0,05) (Baroroh, 2013). Berikut pada Tabel 4.8 adalah hasil uji *Hosmer and Lemeshow* ;

Tabel 4.8 *Hosmer and Lemeshow Test*

<i>Hosmer and Lemeshow Test</i>							
Step	<i>Chi-square</i>		<i>Cutt Off</i>	Sig.	<i>a</i>	Keterangan	
1	9,259	<	15,507	0,321	>	0,05	Baik

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa model regresi logistik sudah memenuhi asumsi kelayakan model, hal ini dapat dilihat dari nilai $9,259 < 15,507$ dan $0,321 > 0,05$.

2. *Likelihood Fit Model*

Pengujian rasio kecocokan (*likelihood fit model*) adalah dengan membandingkan angka *-2 Log Likelihood* pada model awal (*Block = 0*) dengan angka *-2 Log Likelihood* pada model final (*Block = 1*), “apabila terjadi penurunan *-2 Log Likelihood*“, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model tersebut menunjukkan model fit (Sarwono, 2013). Berikut pada Tabel 4.9 adalah hasil *Likelihood fit model* ;

Tabel 4.9 *Likelihood fit model*

<i>Likelihood Fit Model</i>				
Step	<i>-2 Log Likelihood</i>	Step	<i>-2 Log Likelihood</i>	Keterangan
0	123,016	1	91,032	Baik

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 4.9 hasilnya menunjukkan bahwa model regresi logistik sudah memenuhi asumsi kelayakan model, hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan nilai *-2 Log Likelihood* pada model awal (123,016) dengan angka *-2 Log Likelihood* pada model final (91,032).

4.2.4 Analisis Regresi Logistik

Tabel 4.10 Hasil Regresi Logistik

Variabel <i>Independent</i>	<i>Block 1 : Method</i> <i>Coefficients Exp(B)</i>	Sig.	<i>a</i>	Keterangan
(Constant)	-0,837	-	-	-
Pendidikan (X ₁)	1,510	0,006	< 0,05	Signifikan
Pendapatan (X ₂)	1,361	0,024	< 0,05	Signifikan
Persepsi (X ₃)	4,423	0,015	< 0,05	Signifikan

Negelkerke R-Square = 0,391
Omnibus Test = 31,984

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 4.10 koefisien regresi logistik, maka persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah ;

$$\hat{Y}_t = -0,837 + 1,510X_1 + 1,361X_2 + 4,423X_3$$

1. Nilai konstanta -0,837, menunjukkan bahwa jika tidak ada aktivitas pada pendidikan, pendapatan dan persepsi wajib pajak tentang sanksi maka nilai peluang kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB sebesar -0,837;
2. Nilai koefisien pada variabel pendidikan 1,510, menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendidikan akan memberikan peluang prediksi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB sebesar 1,510 kali, dan sebaliknya;
3. Nilai koefisien pada variabel pendapatan 1,361, menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan akan memberikan peluang prediksi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB sebesar 1,361 kali dan sebaliknya;
4. Nilai koefisien pada variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak 4,423, menunjukkan bahwa setiap kenaikan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak akan memberikan peluang prediksi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB sebesar 4,423 kali dan sebaliknya.

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis

1. Uji *Wald Test Homster* dan *Lameshow*

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen* secara parsial. Kemampuan variabel *independen* dalam memprediksi atau mempengaruhi variabel *dependen*, dapat dilihat dari tingkat signifikansi Uji *Wald* masing-masing variabel “apabila tingkat signifikansi $> 0,05$, maka variabel *independen* tidak memiliki kemampuan memprediksi kemungkinan variabel *dependen*, sebaliknya apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka variabel *independen* memiliki kemampuan dalam memprediksi atau mempengaruhi kemungkinan variabel *dependen*” (Baroroh, 2013). Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, berikut hasil uji *wald test* untuk mengetahui kemampuan variabel *dependen* dalam memprediksi atau mempengaruhi variabel *independen* ;

- 1) Variabel pendidikan (X_1) memiliki nilai *odds ratio* sebesar 1,510 dan signifikansi $0,006 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel pendidikan dapat mempengaruhi adanya kepatuhan masyarakat yang akan mengindikasikan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro. Nilai *odds ratio*-nya sebesar 1,510, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pendidikan, maka peluang kepatuhan masyarakat lebih besar 1,510 kali, jika dibandingkan dengan tidak akan memiliki kepatuhan sama sekali.

Nilai *odds ratio* 1,510 berarti bahwa jika dilakukan perubahan dalam pendidikan, kemungkinan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro akan bertambah sebesar 15,1%, apabila responden didalam suatu wilayah sebesar 97 responden, maka ;

$$\begin{aligned}\text{Kepatuhan} &= -0,837 + (1,510 \times 97) \\ &= 145,663\%\end{aligned}$$

Artinya, probabilitas masyarakat membayar PBB karena adanya pendidikan adalah sebesar 145,663%, jika semakin banyak responden didalam suatu wilayah, kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB akan meningkat.

- 2) Variabel pendapatan (X_2) memiliki nilai *odds ratio* sebesar 1,361 dan signifikansi $0,024 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel pendapatan dapat mempengaruhi adanya kepatuhan masyarakat yang akan mengindikasikan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro. Nilai *odds ratio*-nya sebesar 1,361, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pendapatan, maka peluang kepatuhan masyarakat lebih besar 1,361 kali, jika dibandingkan dengan tidak akan memiliki kepatuhan sama sekali.

Nilai *odds ratio* 1,361 berarti bahwa jika dilakukan perubahan dalam pendapatan, kemungkinan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro akan bertambah sebesar 16,61%, apabila responden didalam suatu wilayah sebesar 97 responden, maka ;

$$\begin{aligned}\text{Kepatuhan} &= -0,837 + (1,361 \times 97) \\ &= 131,18\%\end{aligned}$$

Artinya, probabilitas masyarakat membayar PBB karena adanya pendapatan adalah sebesar 131,18%, jika semakin banyak responden didalam suatu wilayah, kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB akan meningkat.

- 3) Variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi (X_3) memiliki nilai *odds ratio* sebesar 4,423 dan signifikansi $0,015 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi dapat mempengaruhi adanya kepatuhan masyarakat yang akan mengindikasikan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro. Nilai *odds ratio*-nya sebesar 4,423, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak tentang sanksi, maka peluang kepatuhan masyarakat lebih besar 4,423 kali, jika dibandingkan dengan tidak akan memiliki kepatuhan sama sekali.

Nilai *odds ratio* 4,423 berarti bahwa jika dilakukan perubahan dalam persepsi wajib pajak tentang sanksi, kemungkinan kepatuhan masyarakat dalam

pembayaran PBB di Desa Karangdoro akan bertambah sebesar 44,23%, apabila responden didalam suatu wilayah sebesar 97 responden, maka ;

$$\begin{aligned}\text{Kepatuhan} &= -0,837 + (4,423 \times 97) \\ &= 428,194\%\end{aligned}$$

Artinya, probabilitas masyarakat membayar PBB karena adanya persepsi wajib pajak tentang sanksi adalah sebesar 428,194%, jika semakin banyak responden didalam suatu wilayah, kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB akan meningkat.

2 Uji Omnibus Test

Uji *Omnibus Test* digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan atau serentak, dengan signifikansi terbesar 0 (= nol), dengan $df = 3$ (7,81473), “*degress of fridom* atau sebanyak variabel bebas” mengikuti distribusi *Chi-square (Omnibus Test > X²)*. Nilai *Omnibus Statistic* dalam model logistik diketahui sebesar 31,984 > 7,81473 dengan tingkat signifikansi sama dengan nol, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara serentak variabel pendidikan, pendapatan dan persepsi wajib pajak tentang sanksi dapat mempengaruhi keadaan kepatuhan yang mengindikasikan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro.

3. Variabilitas Nagelkerke R Square

Koefisien ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas yang dapat diterangkan oleh model (Pramesti, 2013). Variabel *independen*, yaitu pendidikan, pendapatan dan persepsi wajib pajak tentang sanksi terhadap variabel *dependen* yaitu keadaan kepatuhan masyarakat yang mengindikasikan kepatuhan yang mengindikasikan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro. Penggunaan koefisien *Nagelkerke R Square* dengan batas R^2 adalah $0 < R^2 < 1$, dalam model logistik ini digunakan ukuran ketepatan fungsional yang berbeda dengan regresi karena variabel terikatnya *dummy* atau *binary*. Ukuran R^2

pada metode logistik diketahui dari nilai *Nagelkerke R Square* yang didasarkan pada tehnik estimasi *likelihood* dengan nilai yang bervariasi dari nol (0) sampai 1 (satu). Berdasarkan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,391 atau 39,1%, yang berarti variasi keadaan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro dapat diterangkan oleh model.

4.2 Pembahasan Hasil Analisis

Hasil analisis yang telah dilakukan dalam model penelitian dengan menggunakan analisis regresi logistik dan berbagai uji asumsi model tentang faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya telah ada berbagai penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB, tetapi dalam metode dan variabel yang digunakan berbeda-beda. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode analisis regresi logistik yang dapat menunjukkan pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian koefisien dari analisis regresi logistik, menunjukkan bahwa pendidikan, pendapatan dan persepsi wajib pajak tentang sanksi dapat mempengaruhi keadaan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan, “pendidikan, pendapatan dan persepsi wajib pajak tentang sanksi dapat memprediksi adanya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro” adalah diterima.

Teori Adolf Wagner pada dasarnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan,

meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan di suatu daerah.

Hasil pada penelitian ini bahwa Pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Dengan artian bahwa pendidikan sebagai tingkat pengetahuan atau jenjang pendidikan seseorang yang didapatkan dari hasil belajarnya secara formal dalam suatu kelembagaan. Hal ini akan mempengaruhi adanya pendidikan atau pengetahuan dalam diri masyarakat. Pendidikan yang ada memang berdasarkan tingkatan pendidikan secara formal, tetapi dalam hal ini dengan pendidikan yang ada tentunya akan merubah pola pikir masyarakat atau seseorang sehingga dengan berubahnya pola pikir seseorang maka kesadaran yang ada mengenai penting dan manfaat dari pajak sehingga pembayaran wajib pajak dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Pendidikan yang ada akan merubah dan menuntun seseorang atau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kepentingannya untuk turut serta dalam membangun atau menyumbang pendapatan bagi daerahnya. Perubahan perilaku masyarakat yang ada akan menjadikan kesadaran masyarakat semakin berkembang dan mengerti mengenai fungsi dan manfaat dari pajak yang, hal ini tentunya akan mengindikasikan adanya kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan dan dibayarkan masyarakat untuk tetap dapat berkontribusi dalam membantu pembangunan yang ada di suatu daerah. Hasil ini sesuai dengan konsep yang dinyatakan Guritno dalam Astuti dan Rini (2008) pendidikan atau pengetahuan akan membimbing pola pikir seseorang agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

Pendapatan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Namun pendapatan dari Wajib Pajak tidak mempengaruhi pengenaan besarnya pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objektif dimana tidak melihat kondisi dari

Wajib Pajak. Masyarakat yang berpendapatan tinggi lebih taat dalam melaporkan kewajiban pajaknya dibandingkan masyarakat yang berekonomi lemah karena, karena orang yang berpendapatan tinggi banyak memiliki bukti potong yang diterima sehingga lebih cenderung taat dalam melaporkan pajak yang dibayarkan. Hasil ini juga sesuai dengan teori Peacock dan Wiseman sebagaimana membuktikan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkatan toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB. Dengan artian bahwa pendapatan sebagai besarnya jumlah penghasilan masyarakatnya yang dihasilkan dari bidang atau profesi yang ditekuninya adalah baik, dengan kata lain bahwa besarnya penghasilan yang diterima dan didapatkan oleh masyarakatnya, hal ini akan mengindikasikan bahwa besarnya pendapatan masyarakat yang ada akan menjadikan masyarakat lebih peduli dalam berkontribusi dalam pembayaran pajak yang dilakukan di wilayahnya, pendapatan masyarakat yang sesuai dan mencukupi kebutuhan hidupnya akan menjadikan masyarakat lebih memiliki kemampuan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan simpanan yang diperlukan untuk kegiatannya, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tentunya akan mengurangi jumlah pendapatan atau simpanan dari masyarakatnya namun apabila masyarakat yang ada memiliki kemampuan lebih dalam mencukupi kebutuhan hidupnya maka masyarakat yang ada akan lebih tanggap terhadap berbagai macam kewajibannya yang berhubungan dengan pengeluarannya yaitu pajak. Kemampuan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan adanya simpanan pendapatan yang dimiliki oleh masyarakatnya akan menjadikan masyarakat lebih

patuh dalam berkontribusi dalam membantu pembangunan yang ada diwilayahnya dengan melakukan pembayaran wajib pajaknya secara berkelanjutan.

Persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak sebagai bentuk pemikiran dari masyarakatnya mengenai kewajibannya dan sanksi yang akan dikenakan kepadanya apabila kewajiban yang diharuskan oleh pemerintah tidak dipatuhi oleh masyarakatnya adalah baik, dengan artian lainnya bahwa adanya pemikiran dari masyarakatnya mengenai sanksi yang diberikan oleh pemerintah dalam memenuhi atau melanggar kewajibannya, hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya pemikiran masyarakat mengenai sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah mengenai pelanggaran terhadap kewajibannya dalam pembayaran pajaknya akan menjadikan masyarakat lebih peduli dalam mengingat dan menentukan kapan seseorang atau masyarakat wajib pajak harus memberikan atau menyetorkan pajaknya pada petugas wajib pajak yang ada didaerahnya, sehingga dengan adanya kewajiban yang telah menjadi suatu bentuk pemikiran dan melekat pada benak atau diri masyarakatnya tentunya akan membentuk kepatuhan pada diri masyarakatnya, kepatuhan yang ada akan menjadi prinsip dasar bagi masyarakat dalam membayarkan pajaknya tepat dengan waktu yang telah ditentukan karena dalam hal ini, masyarakat yang akan mempertimbangkan besarnya sanksi sebagai pembayaran denda dari adanya sanksi kewajiban pajaknya yang tertunda. Hasil tersebut mendukung dengan penelitian Asuti dan Rini (2008) yang membuktikan persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesadaran perpajakan. Dengan demikian, pada penelitian ini persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB secara tepat waktu.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

- 1 Faktor pendidikan dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro. Hal ini membuktikan bahwa dengan semakin baiknya pendidikan dari masyarakatnya, maka peluang kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya menjadi lebih besar;
- 2 Faktor pendapatan dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro. Hal ini membuktikan bahwa dengan semakin baiknya atau sesuainya pendapatan dari masyarakatnya, maka peluang kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya menjadi lebih besar;
- 3 Faktor persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Karangdoro. Hal ini membuktikan bahwa dengan semakin baiknya pemikiran dan pertimbangan dari sanksi yang ada, maka peluang kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya menjadi lebih besar.

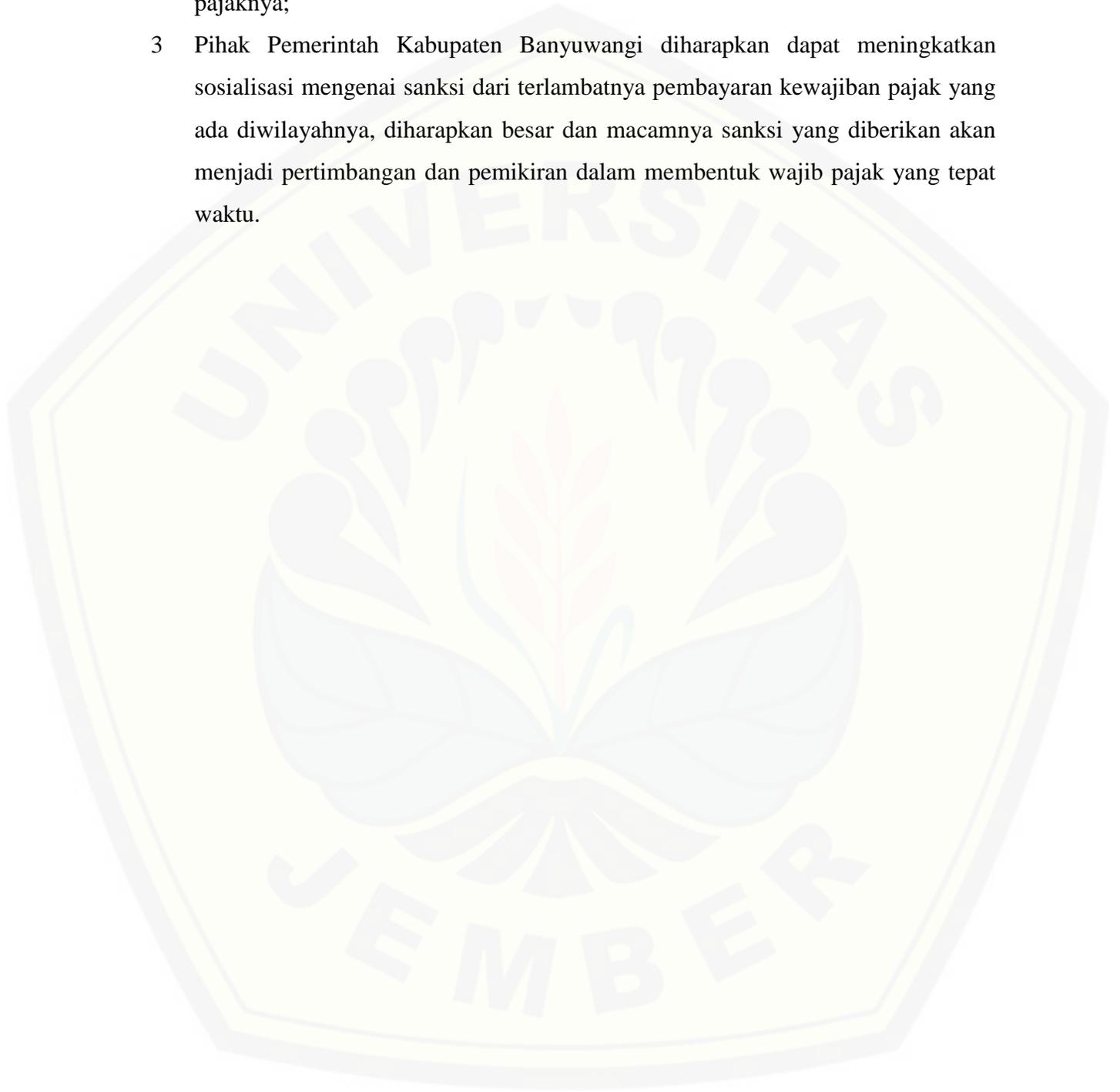
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan yaitu ;

- 1 Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat, diharapkan pendidikan yang ada akan merubah pola pikir masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih sadar mengenai fungsi dan manfaat dari pajak dalam pembangunan;
- 2 Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi pengelolaan pendapatan dan belanja yang ada pada masyarakatnya,

diharapkan masyarakat lebih mampu dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya;

- 3 Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai sanksi dari terlambatnya pembayaran kewajiban pajak yang ada diwilayahnya, diharapkan besar dan macamnya sanksi yang diberikan akan menjadi pertimbangan dan pemikiran dalam membentuk wajib pajak yang tepat waktu.



DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2007, *Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- _____, 2003, *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh*
- _____, 2004, *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*
- _____, 2004, *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- _____, 1994, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*
- Dinas Pendapatan Daerah, 2010. *Realisasi PBB Desa Karangdoro.* Banyuwangi : Dinas Pendapatan Kabupaten
- Dinas Pendapatan Daerah, 2011. *Realisasi PBB Desa Karangdoro.* Banyuwangi : Dinas Pendapatan Kabupaten
- Dinas Pendapatan Daerah, 2012. *Realisasi PBB Desa Karangdoro.* Banyuwangi : Dinas Pendapatan Kabupaten
- Dinas Pendapatan Daerah, 2013. *Realisasi PBB Desa Karangdoro.* Banyuwangi : Dinas Pendapatan Kabupaten
- Dinas Pendapatan Daerah, 2014. *Realisasi PBB Desa Karangdoro.* Banyuwangi : Dinas Pendapatan Kabupaten
- Arsyad, Lincolin, 1997. *Ekonomi Mikro.* BPF, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Astuti, Sri dan Rini. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Melekat pada Wajib Pajak PBB dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Pajak.* Simposium Nasional Perpajakan.
- Baroroh, A, 2013. *Analisis Multivariat dan Time Series dengan SPSS 21.* PT. Elex Media Komputindo. Jakarta

- Basri, Zainul Yuswar dan Mulyadi Subri, 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta : Rajawali Press.
- Devano, Sony dan Rahayu. 2006. *Perpajakan, konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana
- Friedman.2004. *Keperawatan Keluarga*. Jakarta:EG
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi reseaarch edisi 2*. Yogyakarta: Andi
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila, 2011. “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*”. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol.3, No.1
- Insukindro. 1994. *Penerimaan Pajak*, Djambatan, Bandung.
- Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Yenni, 2013. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya*”. *Tax & Accounting Review*. Vol.1, No.1
- Kansil, C.S.T. “*Hidup Berbangsa dan Bernegara (Pedoman Hidup Bernegara untuk Siswa Indonesia)*”, PT. Erlangga, Jakarta , 1993
- Koentarto, Ilham, 2011. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat)*”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol.3, No.2
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1995. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPF
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta : BPF-UGM
- Mardiasmo, (2003). *Perpajakan . Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset Santino.
- Mardiasmo, (2008). *Perpajakan . Edisi Revisi*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Mardiasmo,(2009). *Perpajakan. Edisi Revisi*. (Yogyakarta : Andi, 2009)
- Pramesti, Getut. 2013. *Smart Olah Data Penelitian*. Jakarta : PT Elek Media Komputindo
- Prayitno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Data Statistik Dengan SPSS*. MediaKom, Yogyakarta

Rajiman, 2014. “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Surabaya “. e-Jurnal Kewirausahaan. Vol. 2, No. 1

Riduwan dan Akon. 2009. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistik*. Bandung:

Sarwono, Jonathan. 2013. *12 Jurus Ampuh SPSS Untuk Riset Skripsi*. Jakarta : PT. Elek Media Komputindo

Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo. 1996. Pengaruh Faktor – faktor yang melekat pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Tesis Pascasarjana, UGM.

Sekaran, U, 2009. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Suharno.2003.*Pajak properti : (kajian teoritis dan empiris)*.Jakarta: Direktorat PBB

Sukirno, Sadono, 2004. Makro Ekonomi Modern. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

Sri, Valentina dan Aji Suryo, 2006, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba

Waluyo da Ilyas, Wirawan B, 2007. *Perpajakan Indonesia*, edisi ke 7. Penerbit Salemba empat, Jakarta.

Sumber Internet :

<http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-V-Teori-Pengeluaran-Pemerintah.pdf>

LAMPIRAN 1. KUESIONER PENELITIAN

Judul : Faktor-faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

Kuesioner ini dimaksudkan untuk menulis skripsi sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Petunjuk pengisian :

- Isilah titik-titik dengan jujur dan sebenar-benarnya.
- Untuk pertanyaan yang memiliki pilihan, mohon dicentang salah satu jawaban saja.
- Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu atas partisipasinya.

I. IDENTITAS RESPONDEN

- 1 Nama :
.....
- 2 Jenis Kelamin : L P
- 3 Alamat Asal :
.....
- 4 Status : Belum menikah Menikah Duda/Janda
- 5 Tingkat Pendidikan : Tidak sekolah SD SMP
 SMA D3 S1 S2 S3

****Jika Tidak tamat sekolah, mohon disebutkan kelas terakhir

II. ASPEK PENDIDIKAN

- 1 Apakah bapak paham tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?
.....
- 2 Menurut Bapak, penting atau tidak membayar Pajak ?
.....
- 3 Apakah ada kesulitan saat pembayaran PBB di desa ?

-
- 4 Apakah ada kemudahan saat pembayaran PBB di desa ?
.....
- 5 Apakah di desa bapak pernah ada kegiatan sosialisasi tentang Pajak ?
.....
- 6 Melalui apakah bapak membayar PBB :
- Bank Kantor Pos Langsung ke balai desa
- Petugas pemungut PBB desa

III. ASPEK PENDAPATAN

- 1 Pekerjaan :
- 2 Penghasilan Keluarga per bulan:
- 3 Objek apa saja yang bapak miliki yang dikenakan atas pajak ?
.....
- 4 Apakah selama ini bapak merasa keberatan dengan tarif PBB yang dikenakan ?
.....

IV. ASPEK PRESEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI DENDA

- 1 Apakah bapak mengerti tentang sanksi pajak ?
- 2 Bagaimana tanggapan bapak terhadap penerapan sanksi pajak ?
.....
- 3 Apakah bapak pernah dikenakan sanksi saat keterlambatan dalam membayar PBB ?
.....

V. KEPATUHAN PEMBAYARAN PBB

- 1 Apakah bapak sebagai wajib pajak sudah patuh dalam membayar PBB ?
.....
- 2 Apakah bapak pernah mengalami keterlambatan atau tunggakan dalam membayar PBB ?
.....

VI. Kritik dan Saran terhadap pemungutan Pajak yang ditarik oleh Pemerintah



LAMPIRAN 2. REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

Responden	Kepatuhan Pembayaran PBB	Pendidikan (Tahun)	Pendapatan	Presepsi WP Tentang Sanksi Denda
No	Y	X.1	X.2	X.3
1	1	9	Rp 800.000	2
2	1	9	Rp 1.250.000	2
3	1	12	Rp 1.500.000	2
4	1	10	Rp 1.100.000	2
5	0	4	Rp 700.000	1
6	0	6	Rp 800.000	1
7	0	6	Rp 750.000	1
8	1	12	Rp 1.200.000	2
9	0	6	Rp 850.000	1
10	1	12	Rp 1.500.000	2
11	1	14	Rp 1.700.000	2
12	1	6	Rp 1.500.000	2
13	1	12	Rp 2.000.000	2
14	0	6	Rp 700.000	1
15	0	12	Rp 1.100.000	1
16	0	10	Rp 1.300.000	1
17	1	12	Rp 1.400.000	2
18	1	6	Rp 800.000	1
19	1	14	Rp 1.500.000	2
20	1	12	Rp 1.800.000	2
21	1	12	Rp 2.000.000	2
22	1	6	Rp 900.000	1
23	0	6	Rp 800.000	1
24	1	12	Rp 1.500.000	2
25	1	14	Rp 2.000.000	2
26	1	6	Rp 800.000	1
27	0	5	Rp 750.000	1
28	0	9	Rp 1.600.000	1
29	1	12	Rp 1.450.000	2
30	0	6	Rp 950.000	1
31	1	12	Rp 1.500.000	2
32	1	14	Rp 1.250.000	1
33	1	13	Rp 1.400.000	2
34	0	10	Rp 1.200.000	1
35	1	9	Rp 900.000	1
36	1	6	Rp 850.000	2
37	1	15	Rp 2.500.000	2
38	1	12	Rp 1.500.000	2
39	1	9	Rp 750.000	1
40	0	4	Rp 800.000	1
41	1	10	Rp 1.300.000	1
42	0	6	Rp 850.000	1
43	0	8	Rp 900.000	1
44	1	12	Rp 1.500.000	2

Lanjutan

45	1	15	Rp	2.500.000	2
46	1	6	Rp	850.000	1
47	1	12	Rp	1.300.000	1
48	1	12	Rp	1.400.000	2
49	1	14	Rp	2.100.000	2
50	0	6	Rp	1.000.000	1
51	1	12	Rp	1.500.000	2
52	0	6	Rp	900.000	2
53	0	6	Rp	900.000	2
54	0	11	Rp	1.600.000	2
55	1	10	Rp	1.500.000	2
56	1	12	Rp	1.500.000	2
57	1	12	Rp	1.700.000	2
58	1	6	Rp	700.000	1
59	1	6	Rp	800.000	1
60	1	6	Rp	800.000	2
61	0	12	Rp	1.500.000	2
62	1	9	Rp	1.000.000	1
63	1	12	Rp	1.500.000	2
64	0	6	Rp	800.000	1
65	0	12	Rp	2.500.000	2
66	1	12	Rp	1.000.000	2
67	0	9	Rp	900.000	2
68	1	6	Rp	500.000	1
69	1	14	Rp	2.000.000	2
70	1	6	Rp	1.000.000	2
71	0	3	Rp	900.000	1
72	1	9	Rp	850.000	2
73	1	12	Rp	1.500.000	2
74	1	12	Rp	1.400.000	2
75	0	12	Rp	1.300.000	1
76	1	12	Rp	1.600.000	2
77	1	12	Rp	1.250.000	1
78	0	4	Rp	900.000	1
79	1	13	Rp	1.500.000	2
80	1	14	Rp	2.000.000	2
81	1	6	Rp	800.000	2
82	0	6	Rp	900.000	2
83	1	12	Rp	1.400.000	2
84	0	9	Rp	900.000	1
85	1	14	Rp	2.500.000	2
86	1	6	Rp	1.000.000	1
87	0	6	Rp	700.000	1
88	1	6	Rp	1.000.000	2
89	1	12	Rp	1.400.000	1
90	0	8	Rp	800.000	1
91	1	12	Rp	1.500.000	2
92	1	12	Rp	1.300.000	1
93	1	11	Rp	1.700.000	2
94	1	13	Rp	1.750.000	2
95	0	6	Rp	700.000	1
96	0	6	Rp	650.000	2
97	1	6	Rp	800.000	1

LAMPIRAN 3. HASIL ANALISIS REGRESI LOGISTIK

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y X.1 X.2 X.3

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran PBB di Desa Karangdoro	97	0	1	.67	.473
Pendidikan (Tahun)	97	3	15	9.51	3.205
Pendapatan	97	500000	2500000	1.25E6	463838.965
Presepsi WP Tentang Sanksi Denda	97	1	2	1.57	.498
Valid N (listwise)	97				

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Y

/METHOD=ENTER X.1 X.2 X.3

/SAVE=PRED PGROUP

/CLASSPLOT

/PRINT=GOODFIT CORR ITER(1)

/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	97	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	97	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		97	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Ori...	Internal Value
0	0
1	1

Block 0: Beginning

Iteration History^{a,b,c}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients	
		Constant	
Step 0	1	123.034	.680
	2	123.016	.709
	3	123.016	.709

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 123,016
- c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Classification Table^{a,b}

Observed			Predicted		Percentage Correct
			0	1	
Step 0	Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran PBB di Desa Karangdoro	0	0	32	.0
		1	0	65	100.0
Overall Percentage					67.0

- a. Constant is included in the model.
- b. The cut value is ,500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	.709	.216	10.769	1	.001	2.031

Variables not in the Equation^a

	Score	df	Sig.	
Step 0 Variables X.1	23.886	1	.000	
	X.2	14.021	1	.000
	X.3	19.547	1	.000

- a. Residual Chi-Squares are not computed because of redundancies.

Block 1: Method =

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			
			Constant	X.1	X.2	X.3
Step 1	1	93.450	-2.870	.298	.293	1.118
	2	91.106	-3.664	.392	.325	1.422
	3	91.032	-3.830	.412	.358	1.484
	4	91.032	-3.837	.412	.358	1.487
	5	91.032	-3.837	.412	.358	1.487

- a. Method: Enter
- b. Constant is included in the model.
- c. Initial -2 Log Likelihood: 123,016
- d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	31.984	3	.000
	Block	31.984	3	.000
	Model	31.984	3	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	91.032 ^a	.281	.391

- a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	9.259	8	.321

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

	Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran PBB di Desa Karangdoro = 0		Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran PBB di Desa Karangdoro = 1		Total
	Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1 1	7	7.055	2	1.945	9
2	5	6.909	5	3.091	10
3	7	6.081	3	3.919	10
4	3	3.678	6	5.322	9
5	5	3.385	6	7.615	11
6	4	1.744	6	8.256	10
7	0	.924	8	7.076	8
8	1	1.020	11	10.980	12
9	0	.693	9	8.307	9
10	0	.511	9	8.489	9

Classification Table^a

Observed		Predicted		Percentage Correct
		Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran PBB di Desa Karangdoro		
		0	1	
Step 1	Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran PBB di Desa Karangdoro	0	1	
	0	18	14	56.2
	1	10	55	84.6
	Overall Percentage			75.3

a. The cut value is ,500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	X.1	.412	.150	7.605	1	.006	1.510
	X.2	.358	.129	4.547	1	.024	1.361
	X.3	1.487	.608	5.974	1	.015	4.423
	Constant	-3.837	.955	16.147	1	.000	.022

a. Variable(s) entered on step 1: X.1, X.2, X.3.

Correlation Matrix

		Constant	X.1	X.2	X.3
Step 1	Constant	1.000	-.402	.360	-.523
	X.1	-.402	1.000	-.768	.082
	X.2	.360	-.768	1.000	-.376
	X.3	-.523	.082	-.376	1.000

NPAR TESTS
 /K-S (NORMAL)=Y X.1 X.2 X.3
 /MISSING ANALYSIS.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pendidikan (Tahun)	Pendapatan	Presepsi WP Tentang Sanksi Denda
N		97	97	97
Normal Parameters ^a	Mean	9.51	1246907.22	1.57
	Std. Deviation	3.205	463838.965	.498
Most Extreme Differences	Absolute	.235	.156	.375
	Positive	.224	.156	.306
	Negative	-.235	-.099	-.375
Kolmogorov-Smirnov Z		2.319	1.140	3.690
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.074	.000

a. Test distribution is Normal.

NPAR TESTS
 /K-S (NORMAL)=PRE_2
 /MISSING ANALYSIS.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		97
Normal Parameters ^a	Mean	.6701031
	Std. Deviation	.26123139
Most Extreme Differences	Absolute	.151
	Positive	.127
	Negative	-.151
Kolmogorov-Smirnov Z		1.192
Asymp. Sig. (2-tailed)		.063

a. Test distribution is Normal.

LAMPIRAN 4. TABEL X²

Titik Persentase Distribusi Chi-Square untuk d.f. = 1 - 50

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.010	0.005	0.001
1		1.32330	2.70554	3.84146	6.63490	7.87944	10.82757
2		2.77259	4.60517	5.99146	9.21034	10.59663	13.81551
3		4.10834	6.25139	7.81473	11.34487	12.83816	16.26624
4		5.38527	7.77944	9.48773	13.27670	14.86026	18.46683
5		6.62568	9.23636	11.07050	15.08627	16.74960	20.51501
6		7.84080	10.64464	12.59159	16.81189	18.54758	22.45774
7		9.03715	12.01704	14.06714	18.47531	20.27774	24.32189
8		10.21885	13.36157	15.50731	20.09024	21.95495	26.12448
9		11.38875	14.68366	16.91898	21.66599	23.58935	27.87716
10		12.54886	15.98718	18.30704	23.20925	25.18818	29.58830
11		13.70069	17.27501	19.67514	24.72497	26.75685	31.26413
12		14.84540	18.54935	21.02607	26.21697	28.29952	32.90949
13		15.98391	19.81193	22.36203	27.68825	29.81947	34.52818
14		17.11693	21.06414	23.68479	29.14124	31.31935	36.12327
15		18.24509	22.30713	24.99579	30.57791	32.80132	37.69730
16		19.36886	23.54183	26.29623	31.99993	34.26719	39.25235
17		20.48868	24.76904	27.58711	33.40866	35.71847	40.79022
18		21.60489	25.98942	28.86930	34.80531	37.15645	42.31240
19		22.71781	27.20357	30.14353	36.19087	38.58226	43.82020
20		23.82769	28.41198	31.41043	37.56623	39.99685	45.31475
21		24.93478	29.61509	32.67057	38.93217	41.40106	46.79704
22		26.03927	30.81328	33.92444	40.28936	42.79565	48.26794
23		27.14134	32.00690	35.17246	41.63840	44.18128	49.72823
24		28.24115	33.19624	36.41503	42.97982	45.55851	51.17860
25		29.33885	34.38159	37.65248	44.31410	46.92789	52.61966
26		30.43457	35.56317	38.88514	45.64168	48.28988	54.05196
27		31.52841	36.74122	40.11327	46.96294	49.64492	55.47602
28		32.62049	37.91592	41.33714	48.27824	50.99338	56.89229
29		33.71091	39.08747	42.55697	49.58788	52.33562	58.30117
30		34.79974	40.25602	43.77297	50.89218	53.67196	59.70306
31		35.88708	41.42174	44.98534	52.19139	55.00270	61.09831
32		36.97298	42.58475	46.19426	53.48577	56.32811	62.48722
33		38.05753	43.74518	47.39988	54.77554	57.64845	63.87010
34		39.14078	44.90316	48.60237	56.06091	58.96393	65.24722
35		40.22279	46.05879	49.80185	57.34207	60.27477	66.61883
36		41.30362	47.21217	50.99846	58.61921	61.58118	67.98517
37		42.38331	48.36341	52.19232	59.89250	62.88334	69.34645
38		43.46191	49.51258	53.38354	61.16209	64.18141	70.70289
39		44.53946	50.65977	54.57223	62.42812	65.47557	72.05466
40		45.61601	51.80506	55.75848	63.69074	66.76596	73.40196
41		46.69160	52.94851	56.94239	64.95007	68.05273	74.74494
42		47.76625	54.09020	58.12404	66.20624	69.33600	76.08376
43		48.84001	55.23019	59.30351	67.45935	70.61590	77.41858
44		49.91290	56.36854	60.48089	68.70951	71.89255	78.74952
45		50.98495	57.50530	61.65623	69.95683	73.16606	80.07673
46		52.05619	58.64054	62.82962	71.20140	74.43654	81.40033
47		53.12666	59.77429	64.00111	72.44331	75.70407	82.72042
48		54.19636	60.90661	65.17077	73.68264	76.96877	84.03713
49		55.26534	62.03754	66.33865	74.91947	78.23071	85.35056
50		56.33360	63.16712	67.50481	76.15389	79.48998	86.66082

